

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA  
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : "Lampu Kuning" untuk Pengelolaan Dana Desa  
Entitas / Cakupan : Kabupaten Majalengka  
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.5  
Edisi : Jumat, 13 Oktober 2017

## "Lampu Kuning" untuk Pengelolaan Dana Desa

### MAJALENGKA, (PR).-

Bupati Majalengka Sutrisno mengindikasikan adanya kerugian negara pada pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di 124 desa yang sudah diaudit pihak Inspektorat Kabupaten Majalengka. Kerugian negara itu ditaksir mencapai Rp 4 miliar.

"Selain itu, desa juga banyak yang tidak menyetorkan pajak penghasilan yang angkanya mencapai sekitar Rp 500 juta," kata Sutrisno saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan untuk 124 desa, Kamis (12/10/2017) di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Kabupaten Majalengka.

Menurut Sutrisno, nilai kerugian di-

perkirakan bisa lebih besar jika hasil audit telah dilakukan di seluruh desa. Sebab, pemeriksaan selama ini hanya dilakukan selama tiga hari untuk satu desa sementara pemeriksaan menyangkut tiga hal, masing-masing, kebijakan, kelembagaan, keuangan, serta aset.

"Dari aspek pemanfaatan dana yang dipergunakan oleh desa kerugiannya mencapai Rp 4 miliar. Itu harus segera diperbaiki karena akan ada upaya hukum. Jadi, semua kepala desa harus hati-hati dengan penggunaan dana desa dan dana alokasi desa jika tidak ingin berurusan dengan hukum," ungkap Sutrisno kepada wartawan *Kabar Cirebon Tati Purnawati*, kemarin.

Jika ada persoalan yang tidak dipahami, Sutrisno mengatakan, kepala desa harus segera berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Demikian halnya dengan camat, jika ada yang tidak dipahami segera berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Bupati Majalengka membuka peluang bagi ASN yang ingin menjadi *asesment* dan auditor. Tujuannya, agar pemeriksaan penggunaan dana serta pengerjaan administrasi keuangan di tiap lembaga bisa berjalan baik.

Bupati pun berkali-kali menginstruksikan agar pengelolaan dana di desa benar-benar memiliki dampak bagi kesejahteraan rakyat. Selama ini keuangan

yang dikucurkan ke desa lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti membangun gapura yang justru manfaatnya nyaris tidak ada atau sangat kecil. Padahal, dana desa tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat bisa lebih sejahtera.

Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka Sanwasi mengungkapkan, belum seluruh desa di Kabupaten Majalengka diperiksa. Saat ini baru 124 desa yang pemeriksaannya lebih komprehensif. Selebihnya, untuk 206, desa pemeriksaan dilakukan di tingkat kecamatan bersama sejumlah desa lainnya.\*\*\*